KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU.

Kepada : PERATURAN ERKOM UNIVERSITAS KIAI TEMANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS
INTERNAL UNIVERSITAS KIAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kiai Temang tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Kiai Temang;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33\KMK.02\2010 tentang Penerapan Universitas Kiai Temang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Kiai Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Kiai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1125);

8. Peraturan Menteri Kiai Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Kiai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1125);

7. Peraturan Menteri Kiai Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kiai Teknologi dan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 688);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Statuta Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kementerian Kiai Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14);

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Satuan Pengawasan Internal Universitas Riau merupakan organ yang menyelenggarakan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada Rektor Universitas Riau.

Pasal 2

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:

a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;

b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;

c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal berdasarkan evaluasi kinerja tahunan; dan

d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

a. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara.

e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi pemerintahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

d. pengelolaan administrasi pemerintahan;

e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;

f. pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. pengelolaan administrasi keuangan;

h. pengelolaan administrasi perundang-undangan;

i. pengelolaan administrasi organisasi dan tata laksana;

j. pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan;

k. pengelolaan administrasi hukum dan perundang-undangan;

l. pengelolaan administrasi kearsipan dan dokumentasi;

m. pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan protokol; dan

n. pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa.

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

3. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1. Bagian Perekonomian;

2. Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

3. Bagian Pembangunan.

c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan

3. Bagian Hukum.

d. Staf Ahli, terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:

a. bidang akuntansi/keuangan;

b. bidang manajemen sumber daya manusia;

c. bidang manajemen aset;

d. bidang hukum; dan

e. bidang ketatalaksanaan.

Pasal 3

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berpendidikan paling rendah Sarjana bagi Tenaga Kependidikan;

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;

e. memiliki pengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang yang akan diawasi;

f. mengetahui kebijakan, standar, dan prosedur audit universitas; dan

g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Pertimbangan.

(2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Riau.

(3) அங்ஙனம் கூறப்படும் சொத்தானது பின்வரும் நபர்களுக்கு சொந்தமானதாக இருக்கலாம்:

a. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்/பங்குதாரர்;

b. நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் எவரேனும் ஒருவர் மரணமடைந்தால்;

c. நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு;

d. நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி; அல்லது

e. நிறுவனத்தின் கலைப்பாளர்களுக்கு.

பிரிவு 3

(1) சொத்துக்களை மாற்றம் செய்வதற்கான வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புக் கூட்டாண்மை

சொத்துக்களை மாற்றம் செய்தல்:

a. நிறுவனம் அல்லது பங்குதாரர் ஆகியோர் சார்பாக ஏதேனும் ஒரு நபர்

இதன்;

b. வரம்பு கொண்ட பொறுப்புக் கூட்டாண்மை பதிவாளர் முன்னிலையில்

ஆஜராக கோருமாறு சம்மன் செய்தல்;

c. நிறுவனத்தின் வசமுள்ள சொத்துக்களை அதன் பொறுப்புக்களை

கழிப்பதற்காக;

d. நிறுவனம் கலைக்கப்படும் பட்சத்தில் (அல்லது) மாற்றம் செய்யப்பட

வேண்டிய சொத்துக்களை பிரிவு 53 (அல்லது) 54 இன் கீழ் விற்பனை

செய்வதற்காக;

e. மாவட்டத்தில் நடைமுறைக்கு வரும் சமயம் பிரிவு 3 (ஏ) (அல்லது)

(பி) இன்படி ஒரே விதமான விண்ணப்பம்;

f. மாவட்டத்தின் கலெக்டர், அல்லது அவரால் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட

வருவாய் அதிகாரி;

g. மேற்கு வங்காளத்தைத் தவிர வேறு ஏதேனும் மாநிலம் அல்லது

யூனியன் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சொத்துக்கள்.

(2) அங்ஙனம் குறிப்பிடப்படும் சொத்தானது பின்வரும் நபர்களுக்கு சொந்தமானதாக

(3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Satuan Pengawas Internal Universitas Riau terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Kepala Bagian Tata Usaha;
d. Anggota Bidang audit perencanaan, anggaran, dan keuangan;
e. Anggota Bidang audit pengadaan barang dan jasa dan barang milik negara;
f. Anggota Bidang audit sumber daya manusia, etika dan pembinaan aparatur;
g. Auditor.

(3) ಮೂರನೇ ಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ:

ಅ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಡಿಸುವುದು;

ಬ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು

ಕ. ಅಧಿಸೂಚನೆ.

(4) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪೀಠವನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪೀಠವು

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 6

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjalankan fungsi penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan dan pengeloan kepegawaian keuangan dan barang milik negara, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, pelaksanaan reviu laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 7

(1) Membantu ketua dalam koordinasi penyusunan program pengawasan, pengwasan kebijakan dan program, pengawasan dan pengeloan kepegawaian keuangan dan barang milik negara, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, pelaksanaan reviu laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

(2) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Satuan Pengawasan Internal Universitas Riau.

[illegible]

3 [illegible]

(1) [illegible] [illegible] [illegible]

(3) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.

(4) Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rutin dan insidental di Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

(5) Bertanggungjawab kepada ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

(6) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Keempat
Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan data dan hasil pemeriksaan eksternal dan internal.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8a merupakan unit pelaksana administrasi di Satuan Pengawas Internal.

(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengawas Internal.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeriksaan eksternal dan internal;

(3) Pertanggungjawab jawab dalam membentuknya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

(4) Pertanggungjawab atas pelanggaran oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengurus dan/atau pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi.

(5) Pertanggungjawab atas pelanggaran oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengurus dan/atau pemberi perintah di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

(6) Pertanggungjawab korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan terhadap 1 (satu) atau lebih korporasi.

(7) Dalam hal pengurus, pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pengurus, pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi di tempat pengurus, pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi berkedudukan atau tempat tinggal.

(8) Pengurus, pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pengurus, pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikenakan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengurus, pemberi perintah dan/atau pemilik manfaat korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a. pemegang saham pengendali, direksi, komisaris, pengurus, pegawai yang mempunyai hubungan dengan korporasi, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan korporasi;

b. pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pemegang saham pengendali berkedudukan atau tempat tinggal;

c. pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pemegang saham pengendali berkedudukan atau tempat tinggal;

d. pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pemegang saham pengendali berkedudukan atau tempat tinggal;

c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
d. pemberian layanan informasi di kinerja;
e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Program, Data, dan Informasi; dan
b. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 10

(1) Subbagian Program, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

(2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Satuan Pengawas Internal yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Pasal 11

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, keprotokolan, dan layanan pimpinan.

c. Interpretation and General Clauses Act, 1897 (Act 10 of 1897);

d. International Conventions (Implementation) Act, 1939 (Act 39 of 1939);

e. Interpretation and General Clauses Act, 1977 (Act 1 of 1977);

f. Supplies Act, 1980 (Act 7 of 1980);

g. Supplies Control Act, 1982 (Act 14 of 1982);

h. Supplies Act, 1985 (Act 3 of 1985);

i. Supplies Act, 1988 (Act 5 of 1988);

j. Supplies Act, 1991 (Act 8 of 1991);

k. Supplies Act, 1994 (Act 9 of 1994);

l. Supplies Act, 1997 (Act 11 of 1997);

m. Supplies Act, 2000 (Act 12 of 2000);

n. Supplies Act, 2003 (Act 13 of 2003);

o. Interpretation and General Clauses Act, 2004 (Act 15 of 2004);

p. Supplies Act, 2007 (Act 16 of 2007).

Section 2 Amended

2. In the Supplies Act, 2007 (Act 16 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act:

(a) Supplies Act, 2007 (Act 16 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act, shall be amended as follows:

Section 10 Amended

(i) Supplies Act, 2007 (Act 16 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act, shall be amended as follows:

Section 11 Amended

(ii) Supplies Act, 2007 (Act 16 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act, shall be amended as follows:

Bagian Kelima

Bidang audit perencanaan, anggaran, dan keuangan

Pasal 12

(1) Bagian audit perencanaan, anggaran, dan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perencanaan, pengawasan pengelolaan anggaran dan pengawasan pengelolaan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 Bagian audit perencanaan, anggaran dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan reviu perencanaan , reviu anggaran, reviu laporan keuangan, reviu LAKIP/SAKIP dan reviu lainnya.

b. Melakukan audit laporan keuangan.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temuan pengawasan, dan Bagian audit perencanaan , Bagian keuangan dan anggaran.

d. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan audit, reviu, monev, bimbingan teknis, sosialisasi Bagian audit perencanaan, anggaran, dan keuangan.

e. Melakukan supervisi terhadap penyusunan laporan hasil audit, hasil reviu, dan hasil monev.

f. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil audit, hasil reviu, dan hasil monev, Bagian audit perencanaan anggaran dan keuangan di lingkungan Universitas Riau.

ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೆಸರು.

ಕಾಯ್ದೆಯ ಹೆಸರು, ಆರಂಭ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ.

2. (1) ಕಾಯ್ದೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅನರ್ಹತೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2021 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 4 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಇತರ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು.

ಕಲಂ 15 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಅನರ್ಹತೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1987 (1987 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ 14) ರ ಕಲಂ 15 ರಲ್ಲಿ,-

ಎ. ಪೋಟಿಕಲಂ (1) ರಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಂತುಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅಂದರೆ:-

"ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಂತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಉಪಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಅನರ್ಹತೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;"

ಬಿ. ಪೋಟಿಕಲಂ (2) ರಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಂತುಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅಂದರೆ:-

"ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಂತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಉಪಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಅನರ್ಹತೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;"

ಸಿ. ಪೋಟಿಕಲಂ (3) ರಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಂತುಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅಂದರೆ:-

"ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಂತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಉಪಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಅನರ್ಹತೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;"

ಡಿ. ಪೋಟಿಕಲಂ (4) ರಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ಪರಂತುಕದ ತರುವಾಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರಂತುಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅಂದರೆ:-

"ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಂತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಉಪಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಅನರ್ಹತೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ;"

g. Menghadiri rapat internal satuan pengawas internal Universitas Riau dan kegiatan lainnya.

Bagian Keenam

Bidang Audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara

Pasal 13

(1) Bagian audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e mempunyai tugas melaksanakan analisa, pengasawan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kegiatan-kegiatan pengelolaan PBJ dan BMN dari tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, pemanfaatan, sampai penghapusan sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Bagian Audit Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. Memastikan Bagian Perlengkapan telah melakukan perencanaan pengadaan di awal tahun
b. Memastikan keberadaan fisik barang sesuai dengan daftar barang/jasa yang dimiliki oleh unit kerja.
c. Memeriksa efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Barang Milik Negara.
d. Melakukan pemeriksaan apakah proses pembangunan telah sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun.
e. Memastikan bangunan telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

ii. Mandatory written instruction regarding maintenance of records

iii. Periodic review of records

iv. Mandatory training

Training Requirements

Ensure that only properly trained personnel are allowed to operate Batch Mixing Machine

Part 12

(1) Before any Operator is permitted to operate the Batch Mixing Machine, he/she must have successfully completed a training course approved by the Company, which includes theoretical and practical instruction on the operation of the machine, safety procedures, and emergency response.

(2) The training course must be conducted by a qualified instructor and must cover the following topics: machine operation, safety procedures, emergency response, and maintenance.

(3) Operators must pass a written and practical examination with a minimum score of 80% to demonstrate their knowledge and skills before they are allowed to operate the Batch Mixing Machine.

Maintain records of training:

a. Maintain records of training for each operator, including the date of training, the topics covered, and the results of the examination.

b. Keep records up to date and easily accessible for review by supervisors and auditors.

c. Maintain a log of refresher training for operators, including the date of training and the topics covered.

d. Maintain records of any incidents or accidents involving the Batch Mixing Machine, including the date, time, and nature of the incident, and any corrective actions taken.

e. Maintain records of any modifications or repairs made to the Batch Mixing Machine, including the date, time, and nature of the modification or repair, and any corrective actions taken.

f. Melakukan pengawasan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga proses pembangunan berakhir.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temuan pengawasan, dan pemeriksaan termasuk audit PBJ dan Barang Milik Negara.
h. Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau bidang Barang Milik Negara yang telah dibuat oleh auditor internal bidang barang milik negara.
i. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan, perencanaan, dan implementasi kegiatan universitas terkait dengan pengelolaan bidang Barang Milik Negara.
j. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang terkait dengan bidang barang milik negara kepada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.
k. Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Ketujuh

Bidang Audit SDM, Etika dan Pembinaan Aparatur

Pasal 14

(1) Bagian Audit SDM, Etika dan Pembinaan Aparatur sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan jumlah SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan Universitas pada umumnya dan kebutuhan unit kerja pada khususnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 Bagian Audit SDM, Etika dan Pembinaan Aparatur menyelenggarakan

i. Mahakirtekari bandhu-bandhav bhoosh bahubhashik
   mahan deshi parivartanshil bhinnata ani ekatmatecha
   bandhutvapurn sandesh.

ii. Mahakirtekari samajatil shevatchya manasachi
   vedana, ruramun bandhavanche deshi parivartanache
   mahatva.

iii. Pratyakshat ghadlelya ghatanancha sakshidar
   mhanun tyanche mahatva ani tyanche kartutvache
   vishleshan.

iv. Mahakirtekari kathanatil vividh rasanche
   pradarshan ani tyamadhye karuna rasachi
   pradhanyane jaanvanarya vividh chhatanche
   vishleshan.

v. Mahakirtekari kathanatil vividh alankarancha
   vaparane kathanala prapt jhalelya sahityik
   saundaryache vishleshan.

vi. Mahakirtekari kathanatil bhashik vaishishtye ani
   tyanche vishleshan.

vii. Mahakirtekari kathanatil vividh vyaktichitranatun
   vyaktinchya swabhavavishesh ani tyanche
   vishleshan.

viii. Mahakirtekari kathanatil vividh sthalanche
   mahatva ani tyanche vishleshan.

ix. Mahakirtekari kathanatil vividh prasangache
   mahatva ani tyanche vishleshan.

x. Mahakirtekari kathanatil bhashik vaishishtye ani
   tyanche vishleshan.

Bibliography

Bibliography should be typed as per MLA style.

Font size 14

(i) Bibliography should be typed double spaced.

1 Times New Roman font should be used throughout the bibliography except for the first line of each entry.

(ii) Bibliography should be arranged alphabetically.

(iii) Bibliography should be typed left justified.

fungsi:

a. Melakukan pemeriksaaan SDM setiap unit kerja untuk memastikan tidak ada kapasitas SDM yang menganggur.

b. Melakukan pemeriksaan ketaatan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing unit kerja.

c. Memastikan bahwa semua pegawai aktif beraktivitas di unit kerja yang diaudit sesuai dengan surat kontrak yang disahkan.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa, temuan pengawasan, dan pemeriksaan termasuk audit bidang sumber daya manusia, etika dan pembinaan aparatur.

e. Bertanggung jawab dalam melakukan supervisi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Bagian sumber daya manusia, etika dan pembinaan aparatur yang telah dibuat oleh auditor internal bidang sumber daya manusia.

f. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan, perencanaan, dan implementasi kegiatan universitas terkait dengan bidang sumber daya manusia.

g. Menyampaikan hasil analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk audit yang terkait dengan bidang sumber daya manusia kepada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

h. Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Pruefen:

a. Welche technischen Anforderungen muss ein SDN Server erfuellen, damit er in einer SDN Umgebung eingesetzt werden kann?

b. Welche Vorteile bietet eine Virtualisierung (Hypervisor) gegenüber einer Installation auf Hardware?

c. Welche Möglichkeiten gibt es, um Hardware Ausfälle in einer Virtualisierungsumgebung zu kompensieren?

d. Welche Vorteile bietet eine Virtualisierung für Server Administratoren, Netzwerk Administratoren und Anwender?

e. Welche Möglichkeiten gibt es, um Hardware Ausfälle in einer Virtualisierungsumgebung zu kompensieren?

f. Welche Vorteile bietet eine Virtualisierung für Server Administratoren, Netzwerk Administratoren und Anwender?

g. Welche Möglichkeiten gibt es, um Hardware Ausfälle in einer Virtualisierungsumgebung zu kompensieren?

Bagian Kedelapan

Koordinator Auditor Internal

Pasal 15

(1) Melaksanakan arahan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

(2) Menyusun perencanaan program audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya berdasarkan jumlah anggaran Satuan Pengawas Internal Universitas Riau pada tahun tersebut, serta mengkoordinasikannya dengan Ketua, Sekretaris, Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(3) Berkoordinasi dengan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau dan Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan audit dan monev, termasuk temu awal (*entry briefing*), pekerjaan lapangan (*fieldwork*), perumusan temuan dan konfirmasi/klarifikasi masalah, temu akhir (*exit briefing*), dan penyusunan laporan hasil audit dan monev.

(4) Berkoordinasi dengan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau dan Ketua Tim terkait pelaksanaan kegiatan reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya.

(5) Memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau yang telah disupervisi oleh ketua bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber

(1) அகத்தலைவன்மீது மாறுபட்ட கொள்கை கொண்ட தோழனது நட்பானது பிரியாமல் பாதுகாக்கப்படுதல்.

(2) அகன்றுசென்ற தலைவனுடைய பிரிவினால் தலைவி வருந்தி மெலிதல், தலைவன் வருகையை எதிர்நோக்கி ஆற்றியிருத்தல், தோழி தலைவியை ஆற்றுவித்தல், தலைவன் வருகையை அறிவித்தல், தலைவன் வருகையை அறிந்து தலைவி மகிழ்ச்சியடைதல், தலைவன் வருகையை அறிந்து தலைவி வருந்துதல், தலைவன் வருகையை அறிந்து தலைவி ஊடல் கொள்ளுதல், தலைவன் தலைவியை அணுகி ஊடல் தீர்த்தல், தலைவி தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து செல்லுதல், தலைவி தலைவனை நினைத்து வருந்துதல், தலைவி தலைவனை நினைத்து மெலிதல், தலைவி தலைவனை நினைத்து ஆற்றியிருத

daya manusia, dijalankan dengan baik oleh auditor internal sesuai bidang masing-masing.

(6) Membantu pelaksanaan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya.

(7) Melaporkan perkembangan pelaksanaan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya kepada Ketua SPI Universitas Riau dan Ketua Tim.

(8) Merangkum Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, Kertas Data Temuan Monev, Reviu Perencanaan, Reviu Anggaran, Laporan Reviu Laporan Keuangan, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, Laporan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan laporan program kerja lainnya yang dibuat oleh auditor bidang keuangan, barang milik negara, dan sumber daya manusia.

(9) Melaporkan hasil pelaksanaan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya kepada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Riau dan Ketua Tim.

(10) Membuat Laporan Hasil Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

(11) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Kesembilan

Auditor Internal Bidang Keuangan

Pasal 16

Auditor Internal Bidang Keuangan

Lampiran Keputusan

(6) Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Melaksanakan pengendalian pemeriksaan sesuai dengan prosedur kerja pemeriksaan internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan prosedur kerja pemeriksaan internal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan peraturan perundang-undangan.

(8) Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Audit, laporan Hasil Monev, Kertas Kerja Temuan Monev, Kertas Pertanggungjawaban, Kertas Analisa Data Temuan Kerja Laporan Keuangan, Laporan Pemeriksaan Internal Laporan Sosialisasi, Laporan Hasil Audit Laporan Program Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Laporan Program Kerja Pemeriksaan Internal

(1) Melaksanakan perencanaan audit, reviu perencanaan, reviu anggaran,reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang telah disusun koordinator auditor internal.

(2) Membuat program audit, monev, reviu perencanaan, reviu anggaran,reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang perencanaan anggaran dan keuangan, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bagian Audit Perecanaan, Anggaran dan Keuangan.

(3) Melaksanakan audit dan monev, reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang perencanaan, anggaran, dan keuangan.

(4) Berkoordinasi dengan ketua tim audit dan monev serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan audit dan monev bidang perencanaan, anggaran dan keuangan.

(5) Berkoordinasi dengan ketua tim reviu perencanaan, reviu anggaran, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.

(6) Melaksanakan arahan Kepala Bagian Audit Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

(7) Menyusun Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, Kertas Data Temuan Monev, Kertas Kerja Reviu Perencanaan, Reviu Anggaran, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, Laporan Hasil Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan laporan program kerja lainnya yang terkait dengan Bagian perencanaan, anggaran dan

(1) Mahakoshalakku parichayamulla arhathe, tavaru parisarangalil tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

(2) Mahakoshalakku arhathayulla apekshakal tavaru parisarangalil nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

(3) Mahakoshalakku arhathayulla apekshakal tavaru parisarangalil nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

(4) Mahakoshalakku arhathayulla apekshakal tavaru parisarangalil nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

(5) Mahakoshalakku arhathayulla apekshakal tavaru parisarangalil nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

(6) Mahakoshalakku arhathayulla apekshakal tavaru parisarangalil nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

(7) Mahakoshalakku arhathayulla apekshakal tavaru parisarangalil nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo tavaru nirppukaranam/tavaru labhyata konsumer. phonilleyo Lahiyasthalathe Kilari Avasyamundo enna parishodhikkuka. Avashyamenkil thaluka supply officeril bandhapedukayum cheyyuka.

keuangan, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan.

(8) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Kesepuluh

Auditor Internal Bidang Sumber Daya Manusia, Etika, dan Pembinaan Aparatur

Pasal 17

(1) Melaksanakan perencanaan audit dan monev, SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, sosialisasi, Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award, dan program kerja lainnya yang telah disusun koordinator auditor internal.

(2) Membuat program audit, monev, SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, sosialisasi, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(3) Melaksanakan audit dan monev, SDM, etika dan pembinaan aparatur, bimbingan teknis, sosialisasi, dan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia.

(4) Berkoordinasi dengan ketua tim audit dan monev serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan audit dan monev bidang sumber daya manusia.

(5) Berkoordinasi dengan ketua tim SDM, etika dan pembinaan aparatur,bimbingan teknis, bimbingan teknis, sosialisasi, serta koordinator auditor internal terkait pelaksanaan kegiatan.

(6) Melaksanakan arahan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(7) Menyusun Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, Reviu Perencanaan, Reviu Anggaran, Kertas Data Temuan Monev, Laporan Reviu

(1) Mahkamah berkenaan telah dan mempunyai, di dalam Malaysia, sama sahaja bidang kuasa sivil dan jenayah yang ada pada Mahkamah Tinggi.

(2) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(3) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(4) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(5) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(6) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(7) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(8) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(9) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(10) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(11) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(12) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(13) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(14) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(15) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(16) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(17) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(18) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(19) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(20) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(21) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(22) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(23) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(24) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(25) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(26) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(27) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(28) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(29) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(30) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(31) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(32) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(33) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(34) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(35) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(36) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(37) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(38) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(39) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(40) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(41) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(42) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(43) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(44) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(45) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(46) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(47) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(48) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(49) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(50) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(51) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(52) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(53) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(54) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(55) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(56) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(57) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(58) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(59) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(60) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(61) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(62) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(63) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(64) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(65) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(66) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(67) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(68) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(69) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(70) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(71) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(72) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(73) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(74) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(75) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(76) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(77) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(78) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(79) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(80) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(81) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(82) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(83) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(84) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(85) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(86) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(87) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(88) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(89) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(90) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(91) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(92) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(93) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(94) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(95) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(96) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(97) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(98) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(99) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(100) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(101) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(102) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(103) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(104) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(105) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(106) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(107) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(108) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(109) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(110) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(111) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(112) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(113) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(114) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(115) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(116) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(117) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(118) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(119) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(120) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(121) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(122) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(123) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(124) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(125) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(126) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(127) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(128) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(129) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(130) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(131) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(132) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(133) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(134) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(135) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(136) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(137) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(138) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(139) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(140) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(141) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(142) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(143) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(144) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(145) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(146) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(147) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(148) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(149) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(150) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(151) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(152) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(153) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(154) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(155) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(156) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(157) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(158) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(159) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(160) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(161) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(162) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(163) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(164) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(165) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(166) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(167) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(168) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(169) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(170) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(171) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(172) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(173) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(174) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(175) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(176) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(177) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(178) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(179) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(180) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(181) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(182) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(183) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(184) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(185) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(186) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(187) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(188) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(189) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(190) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(191) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(192) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(193) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(194) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(195) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(196) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(197) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(198) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(199) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(200) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(201) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(202) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(203) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(204) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(205) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(206) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(207) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fungsinya di bawah Akta ini.

(208) Mahkamah tersebut hendaklah mempunyai dan boleh menggunakan segala kuasa yang perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan fung

Laporan Keuangan, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, Laporan, dan laporan program kerja lainnya yang terkait dengan bidang sumber daya manusia, serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

(8) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

Bagian Kesebelas

Auditor Internal Bidang Barang Milik Negara

Pasal 18

(1) Melaksanakan perencanaan audit dan monev, pengadaan barang dan jasa, kegiatan bimbingan teknis, dan kegiatan sosialisasi yang telah disusun koordinator auditor internal.

(2) Membuat program audit dan monev bidang barang milik negara.

(3) Melaksanakan audit dan monev asset, reviu laporan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award.

(4) Berkoordinasi dengan ketua tim audit dan monev terkait pelaksanaan audit dan monev bidang barang milik negara.

(5) Berkoordinasi dengan ketua tim reviu Badan Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, bimbingan teknis, sosialisasi, dan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award terkait pelaksanaan kegiatan.

(6) Melaksanakan arahan Kepala Bidang Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara.

(7) Menyusun Laporan Hasil Audit, Kertas Data Temuan Audit, Laporan Hasil Monev, dan Kertas Data Temuan Monev untuk bidang barang milik negara, serta Laporan Reviu Laporan Asset, Laporan Bimbingan Teknis, Laporan Sosialisasi, dan Laporan Satuan Pengawas Internal Universitas Riau Award.

(1) ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶಗಳ

(8) Menghadiri rapat internal Satuan Pengawas Internal Universitas Riau.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

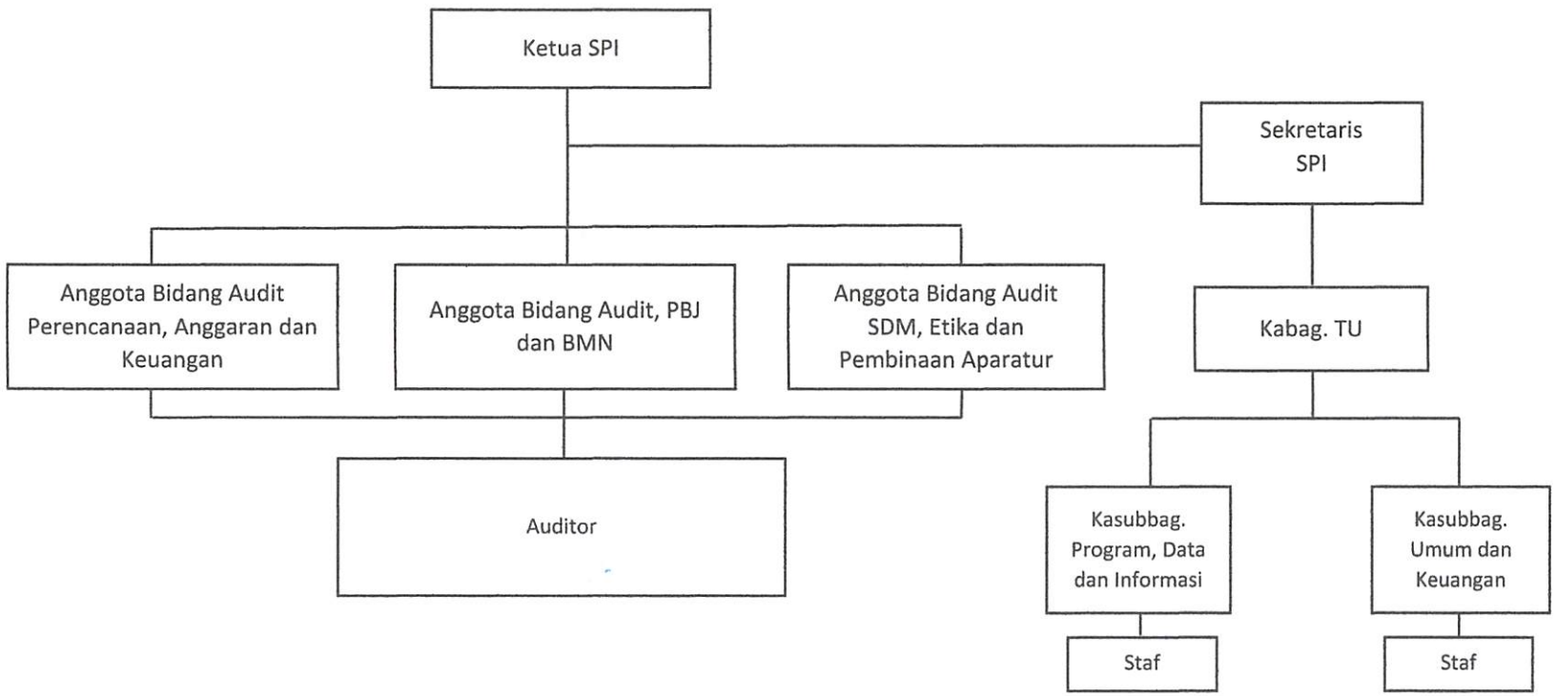
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2018
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 4 JANUARI 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGURUS UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL 4 JANUARI 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KESIA SATUAN

PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS RIAU

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Riau

PENGURUS UNIVERSITAS RIAU,

ASRIL MULYADI

NIP. 195708151986031002